

ABSTRACT

This research explores children's participation as students within a framework of participation assessment based on Lundy's model, comprising four key elements: space, voice, audience, and influence. Despite legal guarantees of children's rights, they are often marginalized in planning and decision-making processes. Previous literature primarily focuses on providing spaces for children to express their opinions. This study used qualitative methods and conducted a case study of elementary schools in Mataram. Data collection involves interviews with school principals, teachers, parents, and students. The findings reveal discrepancies in interpreting children's rights within the educational context. Although students are provided with opportunities, such as class forums, to voice their opinions on academic matters, their involvement is sometimes mediated by adults. Consequently, students do not always receive optimal responses from the advocacy processes they engage in due to bureaucratic barriers within the school system. This study underscores the perception that children lack decision-making capacity in the public domain. To ensure meaningful student participation in school decision-making, policies that respect and facilitate student voices without adult intervention are needed.

Keywords: school policy-making; student; participation; fulfillment of children's rights; Lundy's participation model

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi partisipasi siswa dalam kerangka yang dikembangkan oleh Lundy, yang terdiri dari empat elemen kunci: ruang, suara, audiens, dan pengaruh. Meskipun terdapat jaminan hukum terhadap hak-hak anak, mereka sering kali terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Penelitian dengan metode kualitatif ini dilakukan melalui studi kasus di sekolah dasar di Kota Mataram. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Temuan penelitian mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam interpretasi mengenai hak berpartisipasi bagi anak dalam konteks pendidikan. Meskipun siswa diberi kesempatan, seperti melalui forum kelas untuk mengemukakan pendapat mereka tentang masalah pendidikan, keterlibatannya terkadang diwakili oleh orang dewasa. Akibatnya, siswa tidak selalu menerima respons optimal dari proses yang mereka ikuti karena adanya hambatan birokratis dalam sistem di sekolah. Penelitian ini menekankan adanya persepsi umum bahwa anak-anak kurang memiliki kapasitas pengambilan keputusan dalam domain publik. Untuk memastikan partisipasi siswa yang bermakna dalam pengambilan keputusan di sekolah, diperlukan kebijakan yang menghargai dan memfasilitasi suara siswa tanpa intervensi dari orang dewasa.

Kata kunci: kebijakan sekolah; siswa; partisipasi; pemenuhan hak anak; model partisipasi Lundy

PENDAHULUAN

Secara umum, pengertian anak mengacu pada manusia yang belum dewasa atau masih dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Sebagai manusia yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, anak-anak dijamin hak-haknya, dan hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh negara (Kusumawardani & Prasetyo, 2018). Pemerintah wajib memenuhi empat hak penting anak: kelangsungan hidup, keamanan, pertumbuhan dan perkembangan, serta partisipasi (UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak; Save the Children, 2016; & UNICEF, 1989). Kegagalan dalam pemenuhan hak-hak anak berdampak pada masa depan mereka, bahkan dapat menciptakan masalah bagi keluarga dan masyarakat (Merkel-Holguin dkk., 2020; Santoso, 2017). Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak.

Laporan tahunan UNICEF (2019) menunjukkan bahwa partisipasi merupakan hak mendasar yang perlu dipenuhi. Partisipasi anak adalah hak untuk didengar dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut anak (Solin & Ruwaida, 2022). Ironisnya, pemenuhan hak partisipasi, yang merupakan hak dasar anak, tidak berjalan sesuai harapan. Anak-anak seharusnya berpartisipasi dalam mendapatkan dan mengemukakan kebutuhan mereka di semua bidang, termasuk pendidikan (UNICEF, 2019). Kenyataannya, anak-anak sering dianggap remeh dan dianggap sebagai individu yang tidak mampu mengungkapkan kebutuhannya, sehingga mereka tidak perlu didengar. Padahal, anak-anak adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab mereka sendiri. Pandangan ini yang membuat pemenuhan hak partisipasi anak tidak diimplementasikan secara bermakna.

Pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia menjadi hal yang mendesak, karena Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030, kondisi di mana jumlah warga negara usia produktif melebihi jumlah warga negara usia tidak produktif (Warsito, 2019). Kesempatan ini hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu negara. Hal ini menjadi peluang emas bagi perkembangan Indonesia, sekaligus tantangan untuk mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari kebuntuan (Bayuni, 2020). Kebuntuan terjadi jika pendidikan, kesehatan,

perumahan, dan fasilitas umum penduduk tidak disiapkan dengan baik (Mishra, 2007). Dalam hal ini, sangat penting bagi Indonesia mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa generasi mudanya siap memimpin negara menuju masa depan yang sejahtera, termasuk melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembentukan kebijakan, bukan hanya melihatnya dari sudut pandang orang tua.

Realisasi hak partisipasi anak memiliki posisi fundamental dalam dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui Kurikulum Merdeka mentransformasi pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang holistik dan adaptif (Anggraena dkk., 2021). Upaya transformasi ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang relevan sehingga keluaran dan hasil dari pendidikan dapat optimal (Lembong dkk., 2023). Bahkan dalam tahap perencanaan, kurikulum operasional satuan pendidikan dirasa matang ketika sekolah mampu menyesuaikan aspirasi warga satuan pendidikan seperti siswa, orang tua, dan masyarakat dengan visi misi pendidikan (Anggraena dkk., 2022). Partisipasi siswa merupakan bagian penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, baik di ruang kelas maupun dalam perancangan kurikulum pada konteks yang lebih luas. Meninjau dari dokumen operasional Kurikulum Merdeka, partisipasi siswa seharusnya diimplementasikan tidak hanya pada proses belajar, melainkan juga pada tahap perencanaan serta evaluasi pembelajaran dan kurikulumnya (Anggraena dkk., 2022; Hastasasi dkk., 2022).

Para peneliti dalam paradigma sosiologi anak mengungkapkan bahwa diskusi tentang anak-anak merupakan topik yang menarik (Christensen & James, 2017; Prout, 2011). Anak-anak dipandang sebagai pelaku sosial dengan pandangan independen dan kemampuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat (Mayall, 2000). Sebagai pelaku sosial yang independen, mereka dianggap memiliki budaya yang berbeda dari orang dewasa, dan oleh karena itu, pemberian tugas-tugas sosial dan tanggung jawab harus dipisahkan. Berbeda dengan orang dewasa yang menganggap “kerja” sebagai kategori normal, anak-anak melihat “bermain” sebagai kondisi normal bagi mereka, karena mereka memahami hal-hal dengan cara yang lebih konkret (Mtmeri, 2020). Pemahaman ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan perhatian utama pada anak-

anak, mengingat bahwa mereka mewakili masa depan sebuah bangsa.

Penelitian yang terkonsentrasi pada pengembangan pemuda dan anak telah banyak dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya tren penelitian terkait pendidikan dan psikologi sejak akhir abad ke-20 (Mayall, 2000). Namun, beberapa penelitian yang melibatkan anak cenderung melihat anak sebagai objek penelitian daripada menjadikan mereka partner atau subjek penelitian (Collins, 2017; Mayall, 2000; Morrison dkk., 2019). Kelaziman dalam menjadikan anak sebagai objek dalam perspektif orang dewasa meningkatkan urgensi penelitian untuk melihat sudut pandang anak sebagai individu yang memiliki kapasitas dalam mengungkapkan keinginannya.

Dalam konteks pendidikan, partisipasi siswa ini dikenal dalam topik keterlibatan atau partisipasi warga sekolah. Keterlibatan siswa sering kali dikaji dalam konteks proses belajar mengajar dalam ruang lingkup kelas (Hayati dkk., 2023; Syulbi, 2022; Vania, 2023). Penelitian yang secara spesifik melihat partisipasi siswa dalam proses pengambilan keputusan dan intervensi kebijakan masih minim. Fitriani (2017) melakukan penelitian dengan mengeksplorasi partisipasi siswa pada tingkat sekolah dalam konteks Kurikulum 2013. Penelitian terkait partisipasi siswa pada tingkat sekolah dasar yang dinilai dampaknya pada pengambilan keputusan maupun kebijakan masih jarang dilakukan. Penelitian ini pernah dilakukan di Austria dan Slovenia dengan kesimpulan bahwa dasar hukum menjadi komponen penting dalam meningkatkan partisipasi siswa (Mithans dkk., 2017). Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Holquist dkk. (2023) diketahui bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap penyerapan suara siswa dan terciptanya ruang untuk partisipasi. Peraturan dan pemahaman yang tepat tentang partisipasi merupakan hal yang penting.

Sosiologi anak memainkan peran penting dalam pemenuhan hak-hak anak, mempromosikan interaksi dan implementasi hak-hak tersebut dalam dunia sosial (Collins, 2017; Morrison dkk., 2019). Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi perjanjian internasional yang menguraikan hak-hak anak (UNICEF, 1989; 2019), menempatkan masa kanak-kanak sebagai perhatian fundamental bagi profesional, serta

menekankan keterlibatan anak dalam kebijakan dan praktik (Graham, 2011). Penelitian oleh Cuevas-Parra dan Tisdall (2019) menekankan bahwa anak-anak mampu memengaruhi masyarakat dan pentingnya mendukung hak partisipasi mereka. Di Indonesia, Solin dan Ruwaida (2022) mengevaluasi bahwa implementasi pemenuhan hak-hak anak masih minimal dan tidak efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami implementasi praktis partisipasi siswa dalam kerangka pendidikan yang juga merupakan salah satu fokus dalam pendidikan nasional. Secara khusus, penelitian ini berusaha untuk mengkaji sejauh mana keterlibatan siswa dalam proses pembuatan kebijakan di sekolah. Selain menggali partisipasi siswa, penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis strategi yang digunakan sekolah dalam memfasilitasi keterlibatan siswa dan mengeksplorasi dampak yang mungkin ditimbulkan. Terdapat dua pertanyaan penelitian yang dirancang untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan, yaitu:

1. Bagaimana persepsi orang dewasa mengenai partisipasi siswa dalam pembuatan kebijakan di sekolah?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi siswa di sekolah?

Kerangka Teori

Sebelumnya, teori Hart (1992) banyak digunakan untuk menguji tingkat partisipasi anak dalam mewujudkan partisipasi anak. Hart (1992) merumuskan delapan tingkatan partisipasi anak berdasarkan teori Arnstein (1969), yang dikategorikan menjadi non-partisipasi dan partisipasi. Terkadang, orang dewasa percaya bahwa mereka memberikan hak partisipasi kepada anak-anak, tetapi mereka tidak menyadari bahwa keterlibatan yang mereka berikan tidak bermakna. Mereka hanya memperlakukan anak-anak sebagai alat untuk manipulasi, dekorasi, atau tokenisme (Halliday dkk., 2019; Hart, 1992). Teori Hart telah digunakan untuk melihat perbedaan yang jelas antara tingkatan partisipasi dan nonpartisipasi (Percy-Smith & Thomas, 2010). Tidak hanya secara biner, namun tingkatan kebermaknaan dalam partisipasi juga dapat dilihat melalui teori ini. Cahill dkk. (2015) menggunakan teori Hart dalam penelitiannya

dan menemukan bahwa pemenuhan hak partisipasi siswa telah dilakukan, namun masih pada level bawah yaitu ditugaskan oleh orang dewasa namun diberi informasi. Jadi, partisipasi belum pada tingkat inisiasi oleh kelompok anak.

Kerangka teori yang diajukan Lundy telah digunakan dalam pembuatan kebijakan dan penelitian. Dalam penelitian yang melibatkan suara anak, model partisipasi Lundy merupakan teori yang sering digunakan karena mampu menangkap makna suara anak melalui konsep partisipasi (Welty & Lundy, 2013). Teori partisipasi Lundy sering kali digunakan untuk melihat keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan (Toros, 2021). Kerangka kerja ini juga menjangkau skala umur anak yang bervariasi baik pada anak usia dini maupun remaja (Correia dkk., 2022; Solin & Ruwaida, 2022). Sebagai strategi mengembangkan keterlibatan anak pada skala nasional, *framework* ini dapat digunakan karena disusun sesuai dengan dasar hukum partisipasi anak, yaitu Konvensi Hak Anak Pasal 12 (Roe, 2023).

Konsep pengimplementasian teori partisipasi diterapkan pada proses pengambilan kebijakan baik di tingkat kelas dan sekolah (Perry-Hazan, 2021). Partisipasi di kelas meliputi pengambilan keputusan kebijakan dalam proses belajar dan mengajar (Perry-Hazan, 2021) serta meliputi kebebasan berpendapat terkait tugas maupun metode belajar bersama guru. Pada tingkatan sekolah, pengambilan kebijakan diartikan sebagai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sekolah (Mannion dkk., 2022). Pada level sekolah menengah biasanya diwakili oleh OSIS dan pada level sekolah dasar melalui forum yang diisi oleh orang dewasa (Holquist dkk., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji dan memahami makna anggapan individu tentang masalah sosial atau manusia (Creswell, 2019). Sementara itu, desain studi kasus digunakan untuk menjawab pertanyaan deskriptif (Creswell, 2019). Dalam kasus ini, penelitian akan melihat dari kasus di sebuah sekolah dasar. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi implementasi proses keterlibatan siswa dalam proses pengambilan

keputusan di sekolah. Dengan desain studi kasus, diharapkan dapat ditemukan keterlibatan anak-anak dalam pemenuhan hak partisipasinya.

Penelitian ini dilakukan di sebuah sekolah dasar swasta di Lombok. Sekolah dipilih karena telah menggunakan Kurikulum Merdeka. Salah satu prinsip dalam Kurikulum Merdeka, yaitu pelibatan siswa untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga idealnya sekolah sampel telah mengimplementasikannya. Informan dipilih menggunakan *purposive sampling*, berdasarkan kriteria tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan baik (Brown, 2010). Kriteria khusus yang dipilih adalah orang dewasa yang dekat dengan siswa di sekolah. Ditinjau dari perspektif ekologi, orang tua, dan guru merupakan individu yang tepat (El Zaatari & Maalouf, 2022). Selain itu, kepala sekolah juga dipilih karena merupakan pembuat kebijakan di sekolah.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian pertama, peneliti melihat melalui perspektif orang dewasa, antara lain orang tua siswa, guru, dan kepala sekolah sebagai bentuk triangulasi. Selain itu, pertanyaan kedua akan dijawab melalui sudut pandang anak sebagai pembanding jawaban orang dewasa. Dalam konteks ini, terdapat dua siswa, yang masing-masing kelas lima dan enam yang dilibatkan dan diwawancarai terkait pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di sekolah. Kelas atas dipilih karena mereka telah memiliki pengalaman yang lebih banyak dibanding kelas rendah, juga untuk mendapatkan informasi lebih banyak terkait pelibatan mereka dibandingkan kelas rendah.

Penelitian ini mengikuti panduan etis pelibatan anak dalam penelitian. Kerugian dan keuntungan, persetujuan berdasarkan informasi, privasi dan kerahasiaan, pembayaran dan kompensasi telah dipenuhi (Graham dkk., 2013). Anak yang terlibat dirahasiakan informasi pribadinya dan diberikan kompensasi atas keterlibatan mereka dalam penelitian. Segala data yang diperoleh dan ditampilkan pada penelitian ini telah disetujui oleh orang tua atau wali.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan peserta. Sebagai bukti pendukung, wawancara mendalam adalah salah satu teknik yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian (Johnson & Christensen, 2019). Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk

memperoleh pemahaman mendalam tentang persepsi atau pendapat tentang suatu subjek (Gay dkk., 2012). Wawancara terbuka digunakan untuk memberikan peserta lebih banyak ruang untuk menjelajahi jawaban mereka (Bhandari, 2020). Sebelum wawancara, daftar pertanyaan dirumuskan untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data, serta dalam proses analisis data, baik untuk membandingkan atau menghasilkan kesamaan di antara semua jawaban peserta.

Dalam menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan mewawancarai orang tua, guru, dan kepala sekolah untuk dibandingkan konsistensi jawabannya terkait implementasi partisipasi siswa menurut orang dewasa. Selain itu, tidak ada informan baru setelah wawancara orang tua, guru, kepala sekolah, dan dua orang siswa dalam penelitian ini untuk menjamin saturasi data sampel. Hal ini karena seluruh karakteristik partisipan telah terpenuhi. Walaupun jumlah partisipan yang mewakili setiap karakteristik tergolong sangat sedikit dan dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dengan jumlah partisipan yang lebih banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pelibatan siswa di sekolah yang masih jarang dilihat dalam sudut pandang pendidikan. Penting untuk digarisbawahi bahwa jumlah informan anak yang sedikit menjadi keterbatasan penelitian ini. Limitasi dapat menjadi acuan bagi studi selanjutnya dengan melibatkan informan dengan jumlah lebih banyak. Pelibatan partisipan dalam jumlah besar dan beragam latar belakang dapat memberikan hasil yang komprehensif pada topik penelitian ini.

Seluruh data wawancara melalui proses verbatim dan transkrip yang ditunjukkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam presentasi data. Studi ini menggunakan analisis tematik, yang didefinisikan sebagai “metode untuk mengembangkan, menganalisis, dan menginterpretasikan dataset kualitatif, yang melibatkan prosedur sistematis yang menggunakan pengodean untuk mengembangkan tema” (Braun & Clarke, 2022). Pengodean adalah tahap kunci dalam mengatur dan memberikan makna konten teks selama analisis (Braun & Clarke, 2022). Dalam hal ini, transkrip wawancara diperiksa dan dikodekan secara manual untuk menemukan tema

bersama antara tanggapan yang berbeda dari informan. Tema adalah apa yang dicari melalui pengodean data tekstual. Dengan analisis tematik, diharapkan bahwa tanggapan terhadap isu-isu tertentu yang ingin kita tangani melalui pertanyaan di atas dapat diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi orang dewasa sebagai aktor pengambil kebijakan di sekolah penting untuk dianalisis. Dengan mengetahui persepsi mereka, kita dapat memahami fondasi berpikir orang dewasa dalam melibatkan anak pada proses pengambilan kebijakan di sekolah. Wawancara dilakukan dengan orang tua, guru, dan kepala sekolah untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian mengenai persepsi. Bagian kedua mengeksplorasi proses pelibatan dan pemenuhan hak partisipasi siswa dalam pengambilan kebijakan di sekolah.

Pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan di sekolah telah tercantum dalam panduan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka berusaha meningkatkan partisipasi siswa di sekolah dalam berinisiasi, dan terlibat secara aktif dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi pembelajaran di sekolah (Anggraena dkk., 2022; Hastasasi dkk., 2022)

Persepsi orang dewasa mengenai partisipasi siswa

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pemaknaan partisipasi di satuan pendidikan sampel masih belum mencapai partisipasi yang bermakna dan digambarkan melalui level partisipasi rendah bahkan non-partisipasi.

Kepentingan melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan ditekankan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menganggap bahwa orang tua yang harus memberikan masukan dalam masalah yang memengaruhi pendidikan mereka. Kepala sekolah menyatakan bahwa keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan mengembangkan rasa partisipasi dan tanggung jawab yang diwakili orang tua, yang mengarah pada lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif.

Menurut guru, hak partisipasi siswa melibatkan pengakuan ide-ide siswa seperti metode-metode belajar dan evaluasi tertentu yang disepakati

di dalam kelas. Siswa lebih senang jika belajar melalui *games* atau bercerita di kelas. Pentingnya memahami pandangan siswa dan menyelaraskan kebutuhan mereka dalam proses pembelajaran diakui oleh guru. Guru menekankan bahwa partisipasi siswa mendorong partisipasi aktif dan memberdayakan siswa untuk bertanggung jawab atas pendidikan mereka.

Sedangkan orang tua menekankan perlunya memasukkan pendapat orang tua dalam proses pembuatan kebijakan. Orang tua menganggap bahwa ketika acara atau program diorganisir, orang tua harus mendengarkan dan menghormati ide anak-anak mereka. Orang tua menekankan perlunya kerja sama antara orang tua, pendidik, dan siswa untuk memastikan bahwa kebijakan dan pilihan inklusif dan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan siswa secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat pemahaman yang keliru mengenai apa yang dimaksud dengan hak partisipasi siswa dalam konteks sekolah terutama dari persepsi kepala sekolah dan orang tua, bahwa keterlibatan orang tua dalam partisipasi bisa dianggap mewakili siswa. Orang yang bertanggung jawab sebagai orang tua adalah seseorang yang mengenal anak mereka dan keinginan serta kebutuhan mereka (Brown & Abeywickrama, 2019). Hal tersebut merupakan konsep tokenisme di mana

siswa seolah-olah dapat berpendapat, namun keputusan dan kesempatan berpendapat sebenarnya sudah diatur dan diputuskan oleh orang dewasa (Fitriani, 2017). Tokenisme sering kali terjadi pada kelompok yang dianggap sebelah mata termasuk anak (Settles dkk., 2019; Sinclair dkk., 2019). Aktor yang menjadi pelaku tokenisme ini adalah kepala sekolah dan orang tua siswa. Sedangkan guru yang juga merupakan orang dewasa tidak melakukan tindakan non-partisipasi. Padahal selain kepala sekolah, guru juga memiliki peluang melakukan tokenisme dengan kuasa yang dia miliki (Quinn & Owen, 2016). Tokenisme juga memberikan prioritas kepada orang tua untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan sambil mengabaikan keterlibatan langsung anak-anak dan membatasi partisipasi mereka hanya dalam ruang kelas. Walaupun sekolah telah mencoba memenuhi hak partisipasi ini, namun orang dewasa masih memandang siswa sebagai anak yang tidak dapat mengambil keputusan dengan logis (Yu & Shay, 2022). Orang tua dan kepala sekolah masih memiliki pandangan terbatas tentang anak-anak sebagai pengambil keputusan yang aktif, yang kemudian menciptakan kerangka kerja hierarkis di mana orang tua dan pendidik membuat keputusan atas nama mereka. Hubungan antara orang tua dan anak seharusnya dilihat sebagai konsep hubungan bukan sebagai satu kesatuan individual (Perry-Hazan, 2021).

Tabel 1 Transkrip Wawancara terkait Persepsi Peserta Mengenai Hak Partisipasi Siswa (Pertanyaan Penelitian 1)

Partisipan	Transkrip	Konsep
Kepala Sekolah	“Partisipasi dalam keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau dalam sebuah program.”	Keterlibatan individu dalam pengambilan keputusan.
	“Memang, hal ini menjadi tugas penting bagi sekolah untuk memfasilitasi minat orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti itu.”	Partisipasi merupakan pelibatan orang tua.
Guru	“Partisipasi adalah proses mendengarkan pendapat siswa di kelas untuk menentukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.”	Mendengarkan pendapat siswa.
Orang tua	“Partisipasi itu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, ketika ada acara atau program mengenai siswa, orang tua juga harus mendengarkan pendapatnya.”	Terlibat dan didengarkan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan mengenai siswa.

Sumber: Data Primer Penulis, 2023

Penting untuk menghargai pendapat anak-anak, mendorong kerja sama di antara semua pemangku kepentingan, dan menjamin inklusi dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun pemahaman yang lebih dalam (Harris & Manatakis, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mendefinisikan level partisipasi siswa dalam sekolah lebih tinggi dibanding kepala sekolah dan orang tua (Tabel 1). Perbedaannya, orang tua dan kepala sekolah melihat partisipasi pada tingkat sekolah, sedangkan guru membawa konteks tidak hanya di tingkat sekolah, namun juga pada tingkat pembelajaran kelas yang terdapat lebih banyak interaksi dengan siswa secara langsung. Pembelajaran berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka dirancang untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dan banyak terlibat (Nawati dkk., 2023; Umbara, 2017). Proses partisipasi melibatkan proses peningkatan pada aspek gotong royong, berpikir kritis, mandiri, dan kreatif (Mitra & Serriere, 2012). Manfaat partisipasi juga sejalan dengan pengembangan Profil Pelajar Pancasila.

Pemahaman kepala sekolah dan orang tua bahwa partisipasi siswa dapat diwakili orang dewasa lain seperti orang tua bertentangan dengan prinsip pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Pemahaman yang tepat merujuk ke implementasi yang tepat terkait pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan di sekolah. Pembelajaran seharusnya dirancang sesuai dengan kondisi siswa melalui siswa secara langsung dengan metode yang relevan seperti dialog, tanya jawab, angket, dan diskusi dan posisi orang tua juga dilibatkan dalam menilai rancangan pembelajaran (Anggraena dkk., 2022).

Implementasi pelibatan anak dalam pengambilan keputusan di sekolah

Selain melihat dari perspektif orang dewasa, siswa juga ditanyakan mengenai refleksi pengalaman tentang mengungkapkan pendapat berdasarkan model partisipasi Lundy. Pertanyaan didasarkan kepada empat indikator, yaitu penyediaan ruang, kesempatan bersuara, mendengarkan orang dewasa, dan suara dipertimbangkan atau memberikan pengaruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua dan kepala sekolah, diketahui bahwa terdapat miskonsepsi tentang partisipasi. Mereka memahami partisipasi sebagai pelibatan anak yang dapat diwakili orang dewasa. Sementara bagi guru dan siswa mereka melihat partisipasi dalam ruang yang lebih kecil, yaitu dalam ruang lingkup pembelajaran di kelas. Sedangkan, bagi orang tua dan kepala sekolah mengintervensi suara anak dianggap sebagai hal yang benar. Proses partisipasi menjadi lebih bermakna ketika guru mengajar dan berinteraksi dengan siswa secara langsung. Di dalam kelas guru sering bertanya pada siswa terkait metode pembelajaran yang mereka jalani dan siswa juga merasa dilibatkan dalam proses belajar. Perbedaan mendasar yang menyebabkan mispersepsi tentang partisipasi terletak pada tingkat interaksi. Selain itu, kepala sekolah yang menganggap siswa sebagai individu yang tidak mampu berpikir logis dapat menjadi faktor kurangnya partisipasi di tingkat sekolah (Mayall, 2000). Namun pada ruang kelas, guru lebih bertanya terkait pendapat dan perasaan siswa terhadap metode belajar. Secara logika pertanyaan guru lebih ringan dibandingkan jika melibatkan siswa secara langsung pada pelibatan kebijakan. Namun konsep pelibatan siswa dalam pembuatan kebijakan adalah memberikan ruang jika siswa memiliki masukan, bukan memaksakan untuk memberikan ide pada orang dewasa (Mannion dkk., 2022).

Permasalahan perbedaan jawaban ini didasarkan pada tahap partisipasinya, yaitu kebijakan di tingkat sekolah atau kelas. Pada level kelas, guru memiliki interaksi lebih banyak dengan siswa sehingga lebih mudah untuk dapat melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, sedangkan di tingkat sekolah sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, pemberian ruang yang mendukung terciptanya partisipasi perlu ditingkatkan. Kasus perbandingan menunjukkan bahwa di Slovenia, ketakutan untuk berpartisipasi muncul karena siswa tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, bukan karena mereka tidak memiliki opini terkait hal tersebut (Mithans dkk., 2017). Dalam konteks Indonesia, siswa tidak dibiasakan berinteraksi dengan kepala sekolah dan staf sehingga siswa takut untuk menyuarakan pendapat. Selain itu, kepala sekolah juga merasa tidak perlu membuat ruang partisipasi tersebut.

Tabel 2 Implementasi Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Sekolah (Pertanyaan Penelitian 2)

Partisipan	Transkrip	Konsep
Kepala Sekolah	“Kegiatan forum kelas merujuk kepada forum-forum yang mencakup kelas-kelas dari kelas 1, 2, 3, hingga kelas 6. Ini melibatkan orang tua dari semua siswa.”	Orang tua terlibat melalui forum kelas.
	“Kemudian bagi anak-anak, kita juga ada sesaat, terutama mereka yang memang untuk keperluan sekolah juga, yaitu masalah akreditasi.”	Siswa-siswa aktif berpartisipasi dalam urusan akreditasi dan administrasi sekolah.
	“Setiap hari ada jadwal disiplin untuk anak-anak agar menjaga disiplin lainnya. Anak-anak berpartisipasi dalam hal ini karena itu bersifat informal. Hal yang sama berlaku untuk upacara bendera dan kegiatan imtaq.”	Siswa-siswa hanya dilibatkan dalam implementasi program sekolah.
Guru	“Guru-guru menginisiasi program bimbingan tambahan untuk pembelajaran. Dalam hal ini, peran orang tua dalam partisipasi diwakili oleh guru-guru.”	Partisipasi anak diwakili oleh orang dewasa seperti orang tua maupun guru. Pendapat anak tidak didengar secara langsung.
Orang tua	“Kita menyampaikan unek-unek lewat grup WA kelas, di sana ada wali kelas.”	Orang tua berpartisipasi melalui grup WA.
	“Hambatan-hambatan lebih bersifat pribadi, karena tidak semua orang tua memiliki waktu.”	Orang tua yang sibuk menjadi penghalang bagi partisipasi.

Sumber: Data Primer Penulis, 2023

Menilai temuan berdasarkan implementasi pemenuhan hak partisipasi, kita dapat melihat bahwa aspek pertama dari model tersebut, yaitu ruang, menunjukkan bahwa standar telah terpenuhi di sekolah karena mereka memastikan tempat untuk ekspresi yang tidak diskriminatif. Sekolah telah menciptakan atmosfer yang aman dan inklusif bagi anak-anak dan orang tua mereka untuk dapat terbuka mengungkapkan pandangan dan pendapat tanpa memandang latar belakang mereka (Lundy, 2007; Mangiaracina dkk., 2021).

Dalam hal suara, sekolah telah mendorong siswa dan orang tua untuk mengungkapkan pandangan dan keprihatinan mereka, dan cara berkomunikasi dengan guru dan sesama orang tua telah dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak dan orang tua diberi kesempatan yang sama untuk berbagi pandangan dan keprihatinan mereka. Sekolah tidak hanya menawarkan ruang untuk ekspresi dan memfasilitasinya, tetapi juga mendengarkan dengan aktif dan mempertimbangkan pemikiran dan keprihatinan anak-anak dan orang tua, yang

terkait dengan komponen audiens dari model partisipasi (Harris & Manatakis, 2013; Lundy, 2007). Standar audiens terpenuhi dalam konteks sekolah karena sekolah memiliki kerangka kerja hierarkis untuk menyelesaikan masalah, dimulai dari guru kelas, administrasi, dan jika perlu melibatkan yayasan atau badan pengelola sekolah.

Berdasarkan tinjauan teori, implementasi dilakukan dengan banyak intervensi dan keterwakilan orang secara aktif dalam kegiatan forum kelas, yang mencakup forum untuk kelas 1 hingga 6. Partisipasi ini didukung oleh program forum kelas, yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak mereka. Selanjutnya, hasil kedua menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses akreditasi dan administrasi sekolah. Siswa didorong untuk aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan fokus pada pemahaman hak dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari komunitas sekolah.

Tabel 3 Perspektif Siswa dalam Implementasi Pelibatan Siswa dalam Pengambilan Keputusan sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Partisipasi Anak (Pertanyaan Penelitian 2)

Partisipan	Transkrip	Konsep
Penyediaan Ruang		
Siswa 1	“Salah satu contohnya adalah pada saat pemilihan pengurus kelas, dimana pada saat itu saya bebas berpendapat mengenai calon pengurus kelas yang akan dipilih.”	Penyediaan ruang partisipasi sekolah dilaksanakan pada konteks kelas.
Siswa 2	“Dalam memilih bagaimana cara belajar untuk minggu selanjutnya, apakah bermain atau guru bertanya ke semua siswa.”	Dalam mendesain pembelajaran, guru di kelas memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam merencanakan pembelajaran.
Kesempatan bersuara		
Siswa 1	“Biasanya orang tua yang terlibat dalam forum kelas, bukan murid kesempatan bersuara.”	Siswa tidak diberikan kesempatan bersuara pada proses pengambilan keputusan tingkat sekolah.
Siswa 1	“Keinginan yang belum saya sampaikan di sekolah contohnya adalah permintaan agar pada saat libur setelah pembagian rapor tidak diberikan tugas tambahan pada saat libur.”	Siswa memiliki keinginan bersuara dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah.
Siswa 2	“Salah satu contoh keinginan yang telah saya sampaikan di sekolah adalah di mana setiap kelas memiliki fasilitas yang sama lengkap, seperti AC, LCD dan kipas angin melalui guru.”	Pada tingkat kelas siswa diberikan kesempatan dalam bersuara mengenai fasilitas yang ada di kelas.
Didengarkan orang dewasa		
Siswa 1	“Pada saat di sekolah, yang paling mendengarkan keinginan masalah, pendapat maupun keinginan adalah guru, karena kepala sekolah dan tata usaha cenderung lebih sibuk dibandingkan guru yang mengajar para siswa/ siswi secara langsung.”	Komponen yang menjadi pendengar suara siswa adalah guru.
Siswa 2	“Jika ada masalah di sekolah yang paling mendengarkan masalah masalah itu adalah orang tua, karena hanya kepada orang tua saya terbuka masalah yang ada.”	Siswa tidak merasa didengarkan oleh komponen inti di sekolah, melainkan oleh orang tua.
Dipertimbangkan		
Siswa 1	“Saya lebih nyaman berbicara soal keinginan dengan teman dikarenakan teman saya lebih mendukung apa yang saya inginkan.”	Siswa merasa suaranya paling berpengaruh atau dipertimbangkan jika menyuarkan kepada teman.
Siswa 2	“Salah satu contohnya adalah pada saat meminta pengurangan beban PR pada waktu mendekati ujian sekolah. Selain itu, keinginan lain yang diwujudkan adalah menggunakan metode belajar yang beragam, serta contoh lainnya adalah pada saat menggunakan video pembelajaran sebagai metode belajar.”	Guru merupakan komponen di sekolah yang mempertimbangkan suara siswa dalam pengambilan keputusan.
Siswa 1	“Pada saat pelajaran PPKN saya meminta kepada guru saya untuk melakukan permainan dan guru itu pun menuruti keinginan saya untuk melakukan permainan sebelum belajar.”	Guru merupakan komponen di sekolah yang mempertimbangkan suara siswa dalam pengambilan keputusan.

Sumber: Data Primer Penulis, 2023

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa mendapatkan kesempatan untuk menjadi relawan dalam program-program yang direncanakan oleh sekolah. Hal ini membantu siswa untuk berpartisipasi dalam acara-acara sekolah dan mengembangkan kesadaran terkait tanggung jawab dan partisipasi. Namun, partisipasi dalam program yang sudah ada hanya terjadi pada tataran pelaksanaan kegiatan dan tidak termasuk dalam perencanaan, sehingga partisipasi tersebut tidak utuh (Setiawan, 2013). Kesempatan-kesempatan ini didasarkan pada keputusan yang diambil dalam forum kelas, yang menjamin bahwa pandangan siswa diakui dan dimasukkan dalam program sekolah. Selain itu, guru dapat memainkan peran dalam merefleksikan keterlibatan orang tua ketika mereka tidak ada. Guru mengambil inisiatif untuk mengatur program bimbingan dan peluang belajar ekstrakurikuler lainnya, sebagai perwakilan partisipasi keluarga. Hal ini bisa dinilai sebagai komitmen untuk memastikan hak partisipasi siswa terpenuhi bahkan ketika orang tua mereka tidak ada, meski tidak melibatkan siswa secara langsung.

Berdasarkan pendapat siswa, implementasi pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Temuan konsep partisipasi, berdasarkan wawancara, menunjukkan beberapa aspek kunci yang dapat memandu implementasi tersebut. *Pertama*, penyediaan ruang menjadi faktor utama dalam melaksanakan partisipasi siswa. Ditemukan bahwa partisipasi sekolah cenderung dilaksanakan pada konteks kelas, di mana guru memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam merencanakan pembelajaran. Dalam Kurikulum Merdeka, pelibatan siswa secara aktif dalam proses belajar menjadi ciri khas (Lembong dkk., 2023). Temuan ini juga menunjukkan bahwa ruang partisipasi dapat diperluas ke tingkat sekolah secara keseluruhan. Lalu, kesempatan bersuara menjadi hal krusial dalam pengambilan keputusan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa tidak diberikan kesempatan bersuara pada proses pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Meskipun demikian, siswa memiliki keinginan untuk bersuara, seperti contohnya ketika mereka ingin menyuarakan agar tidak ada tugas tambahan selama libur setelah pembagian rapor. Dalam konteks kelas, siswa diberikan kesempatan untuk bersuara mengenai fasilitas

yang ada di kelas, menunjukkan bahwa pelibatan siswa dapat dimulai dari tingkat kelas.

Selanjutnya, pada aspek audiens diketahui bahwa guru merupakan pendengar utama suara siswa, namun partisipasi ini umumnya terjadi pada tingkat kelas. Siswa juga mengungkapkan bahwa mereka tidak merasa didengarkan oleh komponen inti di sekolah, kecuali melalui orang tua. Komponen *terakhir* adalah mempertimbangkan suara, karena hal ini menjadi faktor kunci dalam partisipasi siswa dan masih menunjukkan hasil yang tidak maksimal. Ditemukan bahwa guru merupakan komponen di sekolah yang cenderung mempertimbangkan suara siswa dalam pengambilan keputusan. Guru memiliki wewenang yang besar jika berbicara mengenai konteks kelas, jika dibawa ke keputusan di tingkat sekolah, maka kepala sekolah menjadi pengambil keputusan.

Selain itu, adanya faktor kesibukan orang tua sebagai wakil dari siswa di sekolah yang menjadi hambatan potensial dalam pemenuhan hak partisipasi siswa. Tidak semua orang tua memiliki cukup waktu untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak mereka, pelaksanaan penuh hak partisipasi anak mungkin terbatas. Hal ini menekankan perlunya dukungan yang lebih besar dan fleksibilitas agar dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi yang dihadapi oleh orang tua. Kepala sekolah menyatakan bahwa beberapa ide dan keluhan dari orang tua terkadang tidak dapat ditangani dengan cepat karena adanya peraturan atau pembatasan yang ditetapkan oleh yayasan sebagai manajemen sekolah (Anam dkk., 2019). Sekolah berusaha untuk menangani dan merespons sebanyak mungkin masalah yang muncul proses pengambilan keputusan. Hal yang mungkin dilakukan guna memenuhi hak partisipasi anak, yaitu mendengarkan dan mempertimbangkan kebutuhan anak dalam pengambilan keputusan, sementara pekerjaan akademis dapat dilakukan dengan perhatian sekolah (Parreiral, 2013). Diharapkan bahwa baik anak-anak maupun orang tua aktif berpartisipasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal dan inklusif yang dapat meningkatkan hasil pendidikan (Afolabi, 2014; ZeenatJahan & Ahmed, 2016).

Pendidikan sekolah seharusnya dilihat sebagai gambaran dari bentuk demokrasi sehari-hari. Siswa yang merupakan komponen sekolah perlu dilibatkan dalam setiap proses berjalannya

pendidikan. Pendekatan pengajaran dianggap sebagai suatu bentuk demokrasi sehari-hari yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan individu, kesehatan masyarakat yang bersifat demokratis, serta pandangan dan sikap generasi muda terhadap konsep demokrasi (Hammerin dkk., 2018). Pengajaran bukan hanya sebagai metode pembelajaran, tetapi juga sebagai dimensi kritis dalam membangun kesehatan demokrasi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada penekanan lebih lanjut terhadap aspek ini dalam praktik pengajaran.

Paradigma dan implementasi partisipasi siswa yang tidak sempurna ini berpengaruh terhadap cara siswa memanfaatkan kesempatan partisipasi mereka pada konteks yang lebih luas. Kurikulum Merdeka yang memuat capaian belajar yang mendorong siswa memiliki kemampuan menganalisis dan kecakapan dalam berkontribusi pada akhirnya menjadi tidak bermakna jika siswa berada pada lingkungan yang tidak inklusif karena merasa tidak dipertimbangkan (Milla, 2018). Keterikatan siswa dengan lingkungannya memengaruhi anak dalam memilih tempat yang dapat menjadi ruang penyampaian suara mereka (Renaldy, 2018). Upaya implementasi Kurikulum Merdeka dalam menciptakan siswa yang memiliki profil Pancasila dapat didorong jika sekolah menyediakan situasi nyata bagi siswa dalam memberikan pendapatnya. Suara siswa cenderung digaungkan pada level yang lebih kecil karena mereka lebih sering didengarkan di tingkat kelas dibandingkan tingkat sekolah.

Pelibatan siswa juga tidak dapat disalahartikan sebagai bentuk pemaksaan maupun pemberian tanggung jawab kepada siswa terhadap implementasi pembelajaran atau sebuah kebijakan di sekolah. Dalam kasus pembelajaran di kelas, pelibatan siswa yang terlalu luas dapat menyebabkan pembelajaran menjadi sangat fleksibel dan tidak terarah dengan baik (Hannum, 2012). Kerangka acuan pembelajaran tetap diperlukan dengan juga mempertimbangkan keinginan siswa yang dapat meningkatkan kualitas belajar di dalam kelas. Jika guru mendapatkan keuntungan pribadi dengan menjadikan siswa sebagai kelompok yang dapat mengerjakan tanggung jawab mendesain pembelajaran, maka hal tersebut termasuk dalam eksploitasi anak. Pedoman yang jelas terkait ruang lingkup pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan perlu dirumuskan.

Di negara berkembang pemahaman dan implementasi terkait dengan partisipasi anak di sekolah cenderung terbatas (Munongi, 2022). Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk sistem pendidikan yang mungkin kurang fokus pada pemberdayaan siswa, budaya yang mungkin menempatkan siswa dalam posisi pasif, atau kurangnya kesadaran pentingnya melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan mereka. Selain itu, masalah infrastruktur, sumber daya, dan keterbatasan akses pendidikan di negara berkembang juga dapat memengaruhi sejauh mana partisipasi anak dapat diwujudkan.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Anak-anak harus dianggap sebagai individu yang independen dengan pandangan berharga, dan mereka harus diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan di sekolah, penelitian ini menganalisis persepsi orang dewasa sebagai aktor pengambil kebijakan. Temuan menunjukkan adanya perbedaan definisi partisipasi siswa antara kepala sekolah, guru, dan orang tua, dengan kecenderungan melibatkan orang tua sebagai wakil siswa. Konsep tokenisme dan hierarki dalam pengambilan keputusan menjadi tantangan yang menciptakan pemahaman kurang tepat tentang peran siswa.

Implementasi hak partisipasi anak di sekolah kerap kali belum sesuai harapan. Diperlukan pengetahuan dan perencanaan yang baik untuk mempromosikan partisipasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, ditemukan miskonsepsi dan kekeliruan dalam implementasi hak partisipasi siswa. Miskonsepsi ini berupa intervensi orang tua pada proses partisipasi, padahal perwakilan partisipasi siswa oleh orang dewasa merupakan bentuk pembatasan partisipasi. Konsep partisipasi yang baik, mengacu pada teori partisipasi Lundy (2007) dan Hart (1998) adalah memberikan kesempatan mengemukakan pendapat tanpa ada intervensi dan masukan pada prosesnya. Namun, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan bersama dengan orang dewasa.

Kenyataannya, meskipun siswa diberi kesempatan melalui forum kelas untuk mengungkapkan pendapat tentang masalah pendidikan, keterlibatan mereka terkadang diintervensi oleh orang dewasa. Implementasi partisipasi siswa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk forum kelas dan keterlibatan siswa dalam urusan sekolah. Namun, masih terdapat hambatan, seperti kesibukan orang tua dan peran guru yang lebih besar dalam menginisiasi program. Perspektif siswa menunjukkan keinginan untuk partisipasi di tingkat sekolah, dan mereka merasa suara mereka tidak selalu didengarkan oleh komponen inti di sekolah.

Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada dasarnya telah memiliki kerangka acuan dengan indikator keterlibatan siswa pada Kurikulum Merdeka. Namun, perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan pada Kurikulum Merdeka terkait pemahaman yang tepat mengenai hak partisipasi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Konvensi Hak Anak (KHA). Tujuannya untuk memastikan bahwa konsep partisipasi anak dalam Kurikulum Merdeka mengakui mereka sebagai peserta aktif dalam proses pengambilan keputusan pendidikan, serta mendorong terciptanya Profil Pelajar Pancasila dengan nilai-nilai yang dihasilkan dari proses pelibatan siswa.

Selain intervensi oleh pusat (kementerian), diperlukan kebijakan yang mengintervensi pada tingkat sekolah yang dalam kasus penelitian ini diperlukan fasilitasi dalam mengakomodir pemahaman partisipasi siswa dari tingkat kelas ke tingkat yang lebih tinggi, dengan kerangka dan indikator yang jelas sesuai dengan panduan operasional Kurikulum Merdeka. Pendekatan yang dilakukan tidak boleh memaksa, namun memfasilitasi dan berbeda dengan partisipasi orang dewasa. Sungguh disayangkan jika pembelajaran yang dirancang agar siswa secara proaktif terlibat dan berani mengambil inisiatif pada implementasi ketika pengambilan keputusan tingkat sekolah siswa merasa tidak dipertimbangkan. Seluruh warga sekolah dapat mengembangkan strategi inklusif melalui penyelenggaraan forum diskusi atau kelompok kerja yang memberikan siswa ruang untuk bersuara tanpa tekanan.

Mekanisme tambahan sebagaimana telah tertuang dalam panduan operasional Kurikulum Merdeka perlu penyempurnaan untuk tingkat sekolah terkait proses perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan pembelajaran seharusnya melibatkan seluruh warga sekolah termasuk siswa dengan *framework* yang jelas terkait porsi masing-masing warga sekolah dalam memberikan pendapatnya. Perlu diadakan sesi dengar suara siswa yang difasilitasi pihak sekolah, khususnya guru BK. Sesi tersebut diadakan bukan untuk memaksa siswa memberikan pendapat, namun memberikan ruang bagi siswa jika ingin mengungkapkan pendapatnya baik terkait kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.

Siswa perlu diberikan ruang menyampaikan pendapat tanpa intervensi atau diwakilkan orang dewasa untuk menjamin murninya keterlibatan siswa. Pada level siswa sekolah dasar, siswa mudah terpengaruh arahan orang tua sehingga mengabaikan keinginan hati.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan implementasi partisipasi siswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang demokratis, di mana suara siswa dihargai dan memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini sebelumnya telah dipresentasikan pada Forum on Education and Learning Transformation (FELT) 2023, untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Forum tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan dan penyempurnaan artikel ini, serta membuka jalan untuk dapat dipublikasikan dan berkontribusi lebih luas pada bidang pendidikan.

PUSTAKA ACUAN

Afolabi, O. E. (2014). Parents' involvement in inclusive education: An empirical test for the psycho-educational development of learners with special educational needs (SENs). *International Journal of Educational Administration and Policy Studies*, 6(10).

- Anam, M. K., Mustiningsih, M., & Sumarsono, R. B. (2019). Kepeimpinan kepala sekolah dalam pembuatan keputusan di sekolah berbasis pesantren. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 2(2), 049–055. <https://doi.org/10.17977/um027v2i22019p49>
- Anggraena, Y., Felicia, N., Ginanto, D. E., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiaswati, D. (2021). Kajian Akademik untuk Pemulihan Pembelajaran. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Anggraena, Y., Ginanto, D., Felicia, N., Andiarti, A., Herutami, I., Alhapip, L., Iswoyo, S., Hartini, Y., & Mahardika, R. L. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah*. BSKAP Kemendikbudristek.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bautista, M. A., Bertrand, M., Morrell, E., Scorza, D., & Matthews, C. (2013). Participatory action research and city youth: Methodological insights from the council of youth research. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, 115(10), 1–23. <https://doi.org/10.1177/016146811311501005>
- Bayuni, E. (2020). Omnibus bill on job creation: Our last bus to demographic bonus. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/01/31/omnibus-bill-on-job-creation-our-last-bus-to-demographic-bonus.html>
- Bhandari, P. (2020). Data collection: definition, methods & examples. *Scribbr*. <https://www.scribbr.com/methodology/data-collection/>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE.
- Brown. (2010). Sampling. Dalam *International Encyclopedia of Education* (hlm. 142–146). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00294-3>
- Brown, H. D., & Abeywickrama, P. (2019). *Language assessment: Principles and classroom practices* (Third edition). Hoboken, NJ: Pearson Education.
- BSKAP Kemendikbudristek (2022). *Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan*. BSKAP Kemendikbudristek.
- Cahill, H., Coffey, J., & Sanci, L. (2015). ‘I wouldn’t get that feedback from anywhere else’: Learning partnerships and the use of high school students as simulated patients to enhance medical students’ communication skills. *BMC Medical Education*, 15(1), 35. <https://doi.org/10.1186/s12909-015-0315-4>
- Christensen, P., & James, A. (2017). *Research with children: Perspectives and practices*. Falmer Press.
- Collins, T. M. (2017). A child’s right to participate: Implications for international child protection. *The International Journal of Human Rights*, 21(1), 14–46. <https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1248122>
- Correia, N., Aguiar, C., & The Participa Consortium. (2022). Children’s right to participate: The Lundy model applied to early childhood education and care. *The International Journal of Children’s Rights*, 30(2), 378–405. <https://doi.org/10.1163/15718182-30020010>
- Creswell, J. W. (2019). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (Sixth edition). Saddle River, New Jersey: Pearson.
- Cuevas-Parra, P., & Tisdall, E. K. M. (2019). Child-led research: Questioning knowledge. *Social Sciences*, 8(2), 44. <https://doi.org/10.3390/socsci8020044>
- El Zaatari, W., & Maalouf, I. (2022). How the Bronfenbrenner bio-ecological system theory explains the development of students’ sense of belonging to school? *SAGE Open*, 12(4),

215824402211340. <https://doi.org/10.1177/21582440221134089>
- Fitriani, A. N. (2017). Partisipasi warga sekolah dalam penyelenggaraan program Full Day School di SMP Muhammadiyah Plus Gunungpring Muntilan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(VI), 810–821.
- Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2012). *Educational research: Competencies for analysis and applications* (10th ed). Boston: Pearson.
- Gordon, K. A. (2014). *Early childhood education: Becoming a professional*. Los Angeles: SAGE.
- Graham, A., Powell, M. A., Taylor, N., Anderson, D., & Fitzgerald, R. (2013). *Ethical research involving children*. Florence Italy: United Nations Children’s Fund (UNICEF).
- Graham, M. (2011). Changing paradigms and conditions of childhood: Implications for the social professions and social work. *British Journal of Social Work*, 41(8), 1532–1547. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcr033>
- Halliday, A. J., Kern, M. L., Garrett, D. K., & Turnbull, D. A. (2019). The student voice in well-being: A case study of participatory action research in positive education. *Educational Action Research*, 27(2), 173–196. <https://doi.org/10.1080/09650792.2018.1436079>
- Hammerin, Z., Andersson, E., & Maivorsdotter, N. (2018). Exploring student participation in teaching: An aspect of student health in school. *International Journal of Educational Research*, 92, 63–74. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.09.007>
- Hannum, W. H. (2012). *Flexible instructional design: The opposite of doing everything isn’t doing nothing*. Educational Technology.
- Harris, P., & Manatakis, H. (2013). *Children’s voices: A principled framework for children and young people’s participation as valued citizens and learners*. Adelaide: Department for Education and Child Development and the University of South Australia.
- Hart, R. A. (1992). *Children’s participation from tokenism to citizenship*. Florence: UNICEF.
- Hastasasi, W., Harjatanaya, T. Y., Kristiani, A. D., Herutami, I., & Andiarti, A. (2022). *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan*. BSKAP Kemendikbudristek .
- Hayati, I., Khofifah, N., & Amin, A. (2023). Efektivitas tahapan proses pengambilan keputusan dalam program inovasi pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar di SMAN 10 Kota Bengkulu. *Journal on Education*, 05(10).
- Holquist, S. E., Mitra, D. L., Conner, J., & Wright, N. L. (2023). What is student voice anyway? The Intersection of student voice practices and shared leadership. *Educational Administration Quarterly*, 59(4), 703–743. <https://doi.org/10.1177/0013161X231178023>
- Indonesia. *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Johnson, R. B., & Christensen, L. B. (2019). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Kusumawardani, E., & Prasetyo, I. (2018). Value transformation in fulfillment of children rights through child-friendly village. *Jurnal VARIDIKA*, 30(1), 36–46. <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6543>
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar sebagai transformasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765–777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Lundy, L. (2007). ‘Voice’ is not enough: Conceptualising article 12 of the United Nations convention on the rights of the child. *British Educational Research Journal*, 33(6), 927–942. <https://doi.org/10.1080/01411920701657033>
- Mangiaracina, A., Kefallinou, A., Kyriazopoulou, M., & Watkins, A. (2021). Learners’ voices in inclusive education policy debates. *Education Sciences*, 11(10), 599. <https://doi.org/10.3390/educsci11100599>

- Mannion, G., Sowerby, M., & l'Anson, J. (2022). Four arenas of school-based participation: Towards a heuristic for children's rights-informed educational practice. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 43(1), 30–47. <https://doi.org/10.1080/01596306.2020.1795623>
- Mayall. (2000). The sociology of childhood in relation to children's rights. *The International Journal of Children's Rights*, 8(3), 243–259. <https://doi.org/10.1163/15718180020494640>
- Merkel-Holguin, L., Schwab-Reese, L., Drury, I., Allan, H., & Hollinshead, D. (2020). Nothing about me without me: Children and young people's experiences with family group conferences. *Child & Family Social Work*, 25(1), 27–36. <https://doi.org/10.1111/cfs.12648>
- Milla, I. (2018). *Pengaruh pendidikan inklusif terhadap keterampilan sosial dan self esteem siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar se-Kecamatan Lowokwaru kota Malang* (Thesis). Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Malang.
- Mishra, V. K. (2007). Social infrastructure: A key factor in harnessing demographic dividend. *The ICFAI Journal of Infrastructure*, 45–57.
- Mithans, M., Ivanuš Grmek, M., & Čagran, B. (2017). Participation in Decision-making in Class: Opportunities and Student Attitudes in Austria and Slovenia. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 7(4), 165–184. <https://doi.org/10.26529/cepsj.369>
- Morrison, F., Cree, V., Ruch, G., Winter, K. M., Hadfield, M., & Hallett, S. (2019). Containment: Exploring the concept of agency in children's statutory encounters with social workers. *Childhood*, 26(1), 98–112. <https://doi.org/10.1177/0907568218810101>
- Mtemeri, J. (2020). Peer pressure as a predictor of career decision-making among high school students in Midlands Province, Zimbabwe. *Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives*, 10(3), 120–131. <https://doi.org/10.18844/gjgc.v10i3.4898>
- Munongi, L. (2022). The Child's right to participation: High school learners' understanding and experiences. *Child Care in Practice*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/13575279.2022.2037515>
- Nawati, A., Yulia, Y., & Khosiyono, B. H. C. (2023). Pengaruh pembelajaran berdiferensiasi model Problem Based Learning terhadap hasil belajar IPA pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 08(1).
- Parreiral, S. (2013). *Children's voice and participation in all school contexts*. Dipresentasikan pada Identities and Citizenship Education: Controversy, crisis and challenges, London. London: CiCe.
- Percy-Smith, B., & Thomas, N. (Ed.). (2010). *A handbook of children and young people's participation: Perspectives from theory and practice*. London ; New York: Routledge.
- Perry-Hazan, L. (2021). Conceptualising conflicts between student participation and other rights and interests. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 42(2), 184–198. <https://doi.org/10.1080/01596306.2019.1599324>
- Prout, A. (2011). Taking a step away from modernity: Reconsidering the new sociology of childhood. *Global Studies of Childhood*, 1(1), 4–14.
- Quinn, S., & Owen, S. (2016). Digging deeper: Understanding the power of 'student voice.' *Australian Journal of Education*, 60(1), 60–72. <https://doi.org/10.1177/0004944115626402>
- Reich, S. M., Kay, J. S., & Lin, G. C. (2015). Nourishing a partnership to improve middle school lunch options: A community-based participatory research project. *Family & Community Health*, 38(1), 77–86. <https://doi.org/10.1097/FCH.0000000000000055>
- Renaldy, A. (2018). *Upaya meningkatkan keberanian berpendapat siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) globalisasi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends 1998 di Kelas 4-D SDI Harapan Ibu* (Skripsi). UIN SYARIF HIDAYATULLAH, Jakarta.

- Roe, S. (2023). *Guidelines for developing a national children's participation strategy*. Strasbourg: Council of Europe.
- Santoso, M. A. F. (2017). The rights of the child in Islam: Their consequences for the roles of state and civil society to develop child friendly education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 7(1), 101. <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i1.101-124>
- Save the Children. (2016, September 15). Understanding four most important sets of children's rights. *Save the Children* <https://www.savethechildren.in/blog/child-protection/understanding-four-most-important-sets-of-childrens-rights/>
- Setiawan. (2013). *Partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah dasar se-Gugus Gili Kelir, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga* (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. Diambil dari <http://eprints.uny.ac.id/14436/1/34.%20Setiawan.pdf>
- Settles, I. H., Buchanan, N. T., & Dotson, K. (2019). Scrutinized but not recognized: (In) visibility and hypervisibility experiences of faculty of color. *Journal of Vocational Behavior*, 113, 62–74. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.06.003>
- Sinclair, L., Vieira, M., & Zufelt, V. (2019). Youth engagement and participation in a child and youth care context. *Scottish Journal of Residential Child Care*, 18(1).
- Solin, R., & Ruwaida, I. (2022). Reflection on the implementation of children's participation rights (Based on Lundy's Participation Model). *Journal of Strategic and Global Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v5i1.1088>
- Syulbi. (2022). Proses internalisasi nilai-nilai kemandirian dalam pembelajaran: studi kasus Kurikulum Merdeka dan meningkatkan kemandirian siswa. *Fuhama Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1).
- Toros, K. (2021). A systematic review of children's participation in child protection decision-making: Tokenistic presence or not? *Children & Society*, 35(3), 395–411. <https://doi.org/10.1111/chso.12418>
- Umbara, U. (2017). Implikasi teori belajar Konstruktivisme dalam pembelajaran Matematika. *Jurnal Matematika Ilmiah STKIP Muhammadiyah Kuningan*, 3(1).
- UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- UNICEF. (2018). *Children's Participation in The Work Of NHRIs*. UNICEF.
- UNICEF. (2019). *UNICEF Annual Report 2019*.
- Vania, F. (2023). *Pengaruh penerapan Kurikulum Merdeka Belajar terhadap mutu kompetensi 4C di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di Bandung* (Skripsi). Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Warren, C. A., & Marciano, J. E. (2018). Activating student voice through Youth Participatory Action Research (YPAR): Policy-making that strengthens urban education reform. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 31(8), 684–707. <https://doi.org/10.1080/09518398.2018.1478154>
- Warsito, T. (2019). Attaining the demographic bonus in Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 6. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.611>
- Welty, E., & Lundy, L. (2013). A children's rights-based approach to involving children in decision making. *Journal of Science Communication*, 12(03), C02. <https://doi.org/10.22323/2.12030302>
- Yu, K., & Shay, C. (2022). Tokenism and barriers to genuine learner participation in school governance in one progressive South African girls' high school. *South African Journal of Education*, 42(4), 1–10. <https://doi.org/10.15700/saje.v42n4a2115>
- ZeenatJahan, & Ahmed, J. (2016). Parental participation in inclusive education. *IRJMISH*, 7(6).